

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Penentuan jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Selanjutnya dilakukan pemantauan harga bapokting pada 6 pasar pantauan (Sentolo, Wates, Bendungan, Nanggulan, Galur, Temon) setiap hari dan hasilnya diupload pada <https://sikepoku.kulonprogokab.go.id>.
2. Kondisi terkini harga rata-rata bahan pokok di Kabupaten Kulon Progo per 29 Desember 2023 dibandingkan harga per 1 April 2024:

Komoditas	Harga 29 Desember 2023	Harga 1 April 2024	HET/Harga Acuan	Persentase Perbandingan Harga	Persentase Perbandingan HET/HA
Beras IR I	Rp13.817,-/kg	Rp14.917,-/kg	Rp13.900,-/kg	8%	7,3%
Beras IR II	Rp12.833,-/kg	Rp14.133,-/kg	Rp10.900,-/kg	10,1%	29,7%
Gula Pasir (Madukismo)	Rp16.917,-/kg	Rp17.417,-/kg	Rp13.500,-/kg	3%	29%
Gula Kelapa	Rp24.833,-/kg	Rp26.333,-/kg		6%	
Migor Kemasan Premium	Rp18.083,-/liter	Rp18.750,-/liter		3,7%	
Migor Curah	Rp14.075,-/liter	Rp15.250,-/liter	Rp14.000,-/liter	8,3%	8,9%
Migor Minyakita	Rp15.000,-/liter	Rp15.583,-/liter	Rp14.000,-/liter	3,9%	11,3%
Tepung Terigu Segitiga Biru	Rp12.417,-/kg	Rp12.333,-/kg		-0,7%	
Daging Sapi Has (Kualitas 1)	Rp143.333,-/kg	Rp143.333,-/kg	Rp140.000,-/kg	=	2,4%
Daging Sapi Rendang/Semur (Kualitas 2)	Rp135.000,-/kg	Rp135.000,-/kg		=	
Daging Ayam Kampung	Rp69.167,-/kg	Rp70.833,-/kg		2,4%	
Daging Ayam Ras	Rp31.833,-/kg	Rp37.833,-/kg	Rp36.750,-/kg	18,8%	2,9%

Ikan Lele	Rp26.167,-/kg	Rp26.167,-/kg		=	
Ikan Kembung	Rp36.667,-/kg	Rp36.500,-/kg		-0,5%	
Ikan Asin Teri (Teri Gundul)	Rp57.500,-/kg	Rp59.167,-/kg		2,9%	
Telur Ayam Kampung	Rp2.583,-/butir	Rp2.583,-/butir		=	
Telur Ayam Ras	Rp26.500,-/kg	Rp27.333,-/kg	Rp27.000,-/kg	3,1%	1,2%
Kedelai Lokal	Rp13.833,-/kg	Rp13.833,-/kg		=	
Kedelai Impor	Rp13.250,-/kg	Rp12.417,-/kg		-6,3%	
Jagung Pipilan Kering (Kuning)	Rp6.750,-/kg	Rp7.417,-/kg	Rp5.000,-/kg	9,9%	48,3%
Kacang Tanah (Kupas)	Rp27.333,-/kg	Rp30.000,-/kg		9,8%	
Kacang Hijau	Rp20.333,-/kg	Rp20.333,-/kg		=	
Ketela Pohon	Rp4.833,-/kg	Rp4.833,-/kg		=	
Bawang Putih (Kating)	Rp40.000,-/kg	Rp42.333,-/kg		5,8%	
Bawang Putih (Honan/Shin Chung)	Rp36.333,-/kg	Rp37.167,-/kg		2,3%	
Bawang Merah (Sedang)	Rp37.000,-/kg	Rp30.833,-/kg	Rp41.500,-/kg	-16,7%	-25,7%
Cabai Merah Keriting	Rp50.000,-/kg	Rp35.667,-/kg	Rp55.000,-/kg	-28,7%	-35,2%
Cabai Rawit Merah	Rp70.833,-/kg	Rp32.833,-/kg	Rp57.000,-/kg	-53,6%	-42,4%
Cabai Rawit Hijau	Rp55.333,-/kg	Rp41.667,-/kg		-24,7%	
Tomat Sayur	Rp15.833,-/kg	Rp26.333,-/kg		66,3%	

Kol/Kobis	Rp10.500,-/kg	Rp8.000,-/kg	-23,8%
Kelapa	Rp4.833,-/butir	Rp5.333,-/butir	10,3%
Garam Bata 1 kg	Rp10.767,-/kg	Rp10.567,-/kg	-1,9%
Garam Halus	Rp16.000,-/kg	Rp16.000,-/kg	=
Salak	Rp7.667,-/kg	Rp8.333,-/kg	8,7%
Jeruk	Rp19.500,-/kg	Rp19.333,-/kg	-0,9%
Mie Instan Indomie Rasa Kari Ayam	Rp2.867,-/bungkus	Rp2.867,-/bungkus	=
Susu Bubuk SGM (Balita) 400gr/dos	Rp41.667,-/dos	Rp41.667,-/dos	=

Keterangan:

1. HET : Harga Eceran Tertinggi sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2023 (HET Beras) dan Permendag 49/2022 (Komoditas Minyak Goreng Curah dan Minyakita)
2. HA : Harga Acuan sesuai Perka Bapanas 5/2022 dan Perka Bapanas 11/2022

Realisasi LPG 3kg Kab Kulon Progo sampai dengan 31 Maret 2024:

Besaran Kuota LPG tabung 3 kg tahun 2024 Kabupaten/Kota se-DIY untuk Kabupaten Kulon Progo sebesar 19.418 (MT) atau 6.472.660 tabung.

Adapun realisasi penyaluran LPG 3 kg di Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

Jenis	Kuota	Realisasi s/d 31 Maret 2024	Sisa	Keterangan
LPG 3Kg	19.418 MT (6.472.660 tabung)	4.651 MT (1.550.332 tabung)	14.767 MT atau 4.922.328 tabung	Persentase pendistribusian 24%

Jumlah Agen: 15

Jumlah Pangkalan: 992

Penambahan realisasi dari pengalihan kuota daerah operasional sekitar yang realisasinya sisa.

Realisasi distribusi solar bersubsidi di Kabupaten Kulon Progo sampai dengan 31 Maret 2024:

Jenis	Kuota	Realisasi s/d 31 Maret 2024	Sisa	Keterangan
Solar Bersubsidi	22.083 kiloliter	4.816 kiloliter	17.267 kiloliter	Persentase pendistribusian 22%

Jumlah SPBU JBT SOLAR : 14

Realisasi distribusi pertalite di Kabupaten Kulon Progo sampai dengan 31 Maret 2024:

Kuota pertalite Kab. Kulon Progo tahun 2024 dari PT. Pertamina Patra Niaga 60.117 kiloliter. Adapun realisasi penyaluran pertalite di Kabupaten Kulon Progo sampai dengan 31 Maret 2024 adalah sebagai berikut :

Jenis	Kuota	Realisasi s/d 31 Maret 2024	Sisa	Keterangan
Pertalite	60.117 kiloliter	13.680 kiloliter	46.437 kiloliter	Persentase pendistribusian 23%

2024. Perkembangan Indeks Perkembangan Harga di Kulon Progo bulan Januari – Maret 2024.

Januari Minggu ke:

1. -0,760%: cabai rawit (-0,418%), Ikan kembung/ikan gembung/ ikan banyar/ikan gembolo/ikan aso-aso (-0,37%), Cabai merah (-0,333%)
2. -1,359%: cabai rawit (-1,219%), cabai merah (-0,399%), daging sapi (-0,351%)
3. -1,440%: cabai rawit (-1,493), cabai merah (-0,437), daging sapi (-0,226)
4. -1,427%: cabai rawit (-1,66), cabai merah (-0,376), daging sapi (-0,167)

Februari Minggu ke:

1. 5,236%: beras (2,898), cabai merah (0,852), daging ayam ras (0,596)
2. 0,757%: beras (1,203), jeruk (0,224), daging sapi (0,169)
3. 2,245%: beras (1,716), jeruk (0,381), cabai merah (0,317)
4. 370%: beras (2,736), cabai merah (0,69), jeruk (0,493)

Maret Minggu ke:

1. 877: daging ayam ras (1,448), telur ayam ras (0,482), cabai rawit (0,145)

- 1,873: daging ayam ras (1,448), telur ayam ras (0,502), bawang merah (0,113)
 3. 1,404: daging ayam ras (1,386), telur ayam ras (0,469), minyak goreng (0,119)
 4. 0,78: daging ayam ras (1,385), telur ayam ras (0,37), minyak goreng (0,126)

2024. Perkembangan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2024.

Jenis	Kuota (kg)	Realisasi s/d 31 Maret 2024 (kg)	Sisa (kg)	Keterangan
F6 Urea	5.149.000	907.535	4.241.465	Persentase pendistribusian 18%

Jenis	Kuota (kg)	Realisasi s/d 31 Maret 2024 (kg)	Sisa (kg)	Keterangan
F6 NPK	4.224.000	1.231.527	2.992.473	Persentase pendistribusian 29%

Jenis	Kuota (kg)	Realisasi s/d 31 Maret 2024 (kg)	Sisa (kg)	Keterangan
F6 NPK Kakao	11.000	0	11.000	Persentase pendistribusian 0%

Risiko cuaca buruk dampak el-nino yang mengurangi produksi pertanian sehingga menurunkan produksi komoditas pertanian. Rendahnya produksi komoditas pertanian dapat memicu kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta mengancam ketersediaannya.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Kendala Komunikasi Efektif Harga Bahan Pokok dan Penting

Masyarakat memerlukan informasi harga bahan pokok dalam rangka merencanakan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari dan kebutuhan pokok sehingga kebutuhan pokok keluarga bisa terpenuhi. Informasi harga bahan pokok juga membantu masyarakat terhadap perkembangan harga kebutuhan pokok yang sangat berkaitan dengan tingkat daya beli. Informasi ini akan membantu mereka memilih tempat belanja dengan harga terjangkau sehingga mereka bisa memaksimalkan penggunaan uang belanja dengan seoptimal mungkin. Selain itu informasi harga bahan pokok juga membantu meningkatkan pengetahuan umum masyarakat tentang kondisi ekonomi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok. Hal ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap stabilitas ekonomi dan kebijakan pemerintah.

Bagi para pelaku usaha dan pedagang, informasi harga bahan pokok penting untuk perencanaan bisnis mereka. Mereka dapat menyesuaikan strategi harga dan persediaan barang dagangan mereka berdasarkan fluktuasi harga bahan pokok.

Secara keseluruhan, pemahaman tentang harga bahan pokok memberikan wawasan yang penting bagi masyarakat dalam membuat keputusan sehari-hari, mengelola keuangan, dan berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi secara efektif. Fluktuasi harga sudah diimbangi dengan informasi yang cepat dari TPID Kulon Progo melalui informasi perkembangan harga di aplikasi sikepoku yang dapat diakses melalui website. Namun, belum banyak masyarakat yang mengakses aplikasi ini karena masyarakat terutama pedagang kecil belum begitu familiar dengan aplikasi yang disediakan melalui website. Oleh karena itu informasi perkembangan harga perlu disampaikan kepada masyarakat umum melalui siaran radio, TV, atau melalui videotron di tempat – tempat strategis.

Kendala Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Penyaluran pupuk masih perlu dipantau. Pupuk dan pestisida merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian sasaran produksi nasional. Oleh sebab itu pupuk dan pestisida harus tersedia sesuai dengan prinsip 7 (tujuh) tepat, yaitu tepat mutu, jumlah, jenis, waktu, tempat, sasaran dan harga yang terjangkau oleh petani. Salah satu upaya Pemerintah dalam memacu peningkatan produktivitas pertanian adalah pemberian subsidi pupuk. Pemberian pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dimaksudkan untuk melindungi petani dari lonjakan harga pupuk dunia sehingga petani dapat membeli pupuk sesuai kebutuhan dan kemampuan dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Subsidi JBT Solar, JBKP Peralite, dan LPG 3kg Kurang Tepat Sasaran

Pengguna JBT Solar, JBKP Peralite, dan LPG 3kg yang merupakan barang bersubsidi masih dinikmati oleh beberapa orang dan/atau usaha yang tidak perlu disubsidi. Subsidi yang tidak tepat dapat menimbulkan kesenjangan daya beli dan meningkatkan disparitas pendapatan.

Kendala Keterjangkauan Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok

Kondisi perkembangan harga Kulon Progo pada akhir triwulan 4 mengalami peningkatan pada *volatile food* yaitu bawang merah, cabai, tomat, dan kol. Kenaikan harga bawang merah (93%) terdampak oleh semakin sedikitnya stock Bawang Merah karena tidak ada panen. Kenaikan harga cabai disebabkan mendekati berakhirnya umur tanaman, sehingga produktivitas menurun. Harga tomat dan kol pada akhir triwulan 4 meningkat 144% dan 66%. Kondisi tersebut disebabkan kondisi musim panas menyebabkan tanaman tomat dan kol tidak optimal, panen sedikit sementara permintaan tetap bahkan cenderung naik.

Kendala Kurang Optimalnya Pendapatan Petani

Perlu dilakukan perlindungan untuk petani agar hasil panen dapat dijual dengan harga terbaik sehingga pendapatan yang didapat lebih optimal. Kendala yang terjadi antara lain turunnya harga produk pertanian pada saat panen raya, dan belum adanya kemampuan untuk melaksanakan tunda jual.

Lemahnya Daya Beli Masyarakat

Daya beli masyarakat masih kurang sehingga jika terjadi inflasi sangat berdampak pada

kondisi perekonomian masyarakat. Masyarakat Kulon Progo juga masih banyak yang mengalami *stunting*. Masyarakat yang kurang sehat dapat berdampak pada turunnya produktivitas dan mutu pendidikan. Pemberian bantuan pemerintah dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli diharapkan dapat mengentaskan masyarakat dari *stunting*. Masyarakat juga memerlukan dukungan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas agar daya beli meningkat.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Anggaran 2024 Rp136.107.609.147,00 terlaksana Rp23.339.556.087,00 s.d. Tw 1 Tahun 2024

Langkah TPID Untuk Komunikasi Efektif Harga Bahan Pokok dan Penting

- Pemantauan harga bapokting pada 6 pasar pantauan (Sentolo, Wates, Bendungan, Nanggulan, Galur, Temon) setiap hari, hasilnya dikomunikasikan ke masyarakat melalui penyajian informasi perkembangan harga kebutuhan pokok setiap hari pada aplikasi SikepoKu dan SP2KP.
- TPID Kulon Progo telah melaksanakan Koordinasi TPID dan Rakor Forkopimda.
- Koordinasi dengan OPD terkait/Pihak terkait mengenai ketersediaan barang pokok dilakukan dengan Dinas Perindag Propinsi DIY, Bulog dan distributor dari DIY.

Langkah TPID Untuk Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan oleh Tim Gabungan dari Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. Dasar pelaksanaan kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida adalah Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pengawasan Pestisida.

Langkah TPID Untuk Subsidi JBT Solar, JBKP Peralite dan LPG 3kg Tepat Sasaran

Saat ini masih uji coba aplikasi monica LPG untuk validasi pangkalan LPG dan aplikasi MAP Lite mypertamina untuk pendataan penyaluran LPG 3kg mulai diberlakukan di beberapa pangkalan. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui SE Gubernur DIY No. 510/0086 tahun 2018 telah melarang penyaluran LPG 3kg kepada ASN di seluruh DIY serta pengusaha restoran, peternakan, pertanian, batik, binatu, jasa las, dan tani tembakau. Sedangkan untuk pengguna solar yang tidak teregistrasi di *mypertamina* telah dibatasi pembelian maksimal 20 liter per hari. Penggunaan solar difokuskan untuk usaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi tertentu, dan pelayanan umum. Petani yang tidak menggunakan kendaraan dapat membeli menggunakan QR Code. Pembelian non kendaraan

masih dilayani, asal pembeli mempunyai surat rekomendasi dari OPD/Kelurahan yang menerbitkan. Jika ada SPBU yang tidak melayani, bisa dilaporkan ke Pertamina. Diharapkan dengan adanya Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 dapat memberikan informasi terkait penerbitan Surat Rekomendasi BBM Bersubsidi baik solar maupun pertalite kepada Perangkat Daerah/Kelurahan dan agar bisa segera ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah/Kelurahan.

Melakukan koordinasi dengan Pertamina terkait kuota BBM untuk Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 melalui komunikasi langsung yang dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Kulon Progo.

Koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga melalui Surat Dinas Perdagangan dan Perindustrian No : 510/0383 tanggal 6 april 2024 Perihal Permohonan Tambahan Kuota LPG 3kg Kab. Kulon Progo.

Langkah TPID Untuk Keterjangkauan Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok

- Proses perencanaan Rehabilitasi Pasar Wates, Rehabilitasi pasar Jombakan, Rehabilitasi Pasar Pripih dan Rehabilitasi Pasar Kasihan, Lendah.
- Pemantauan distribusi beras SPHP / dropping beras SPHP di tingkat pedagang pasar dilakukan di Pasar Wates dan Pasar Bendungan mulai 12 Januari sampai 27 Januari 2024.
- Operasi Pasar dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024 sampai 4 April 2024 dengan sasaran masyarakat yang ada di 12 Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo didahului pelaksanaan rapat koordinasi dengan Kapanewon dan Distributor.
- Pelaksanaan Operasi Pasar di Kapanewon Wates dikunjungi oleh Tim TPID Propinsi DIY dan Tim TPID Kabupaten Kulon Progo. Pada Operasi Pasar tersebut dianggarkan Biaya Paket/Pengiriman (Biaya distribusi Operasi Pasar) sebesar Rp183.600.000,- (Komoditi : Beras Premium, Gula Pasir, Telur dan Minyak Goreng) terealisasi sebesar Rp179.016.000,-. Melibatkan 2 Distributor yaitu PT. Pangan Surya Makmur dan BULOG Divre DIY.
- Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan.
- Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar.
- Mengalokasikan alokasi Dana Tidak Terduga untuk pelaksanaan Operasi Pasar.

Langkah TPID Untuk Optimalikan Pendapatan Petani

- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
- Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah
- Pengembangan Lumbung Mataraman dan Pembinaan terhadap 31 Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)
- Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional
- Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh

Langkah TPID Untuk Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

- Realisasi penyaluran BLT Kalurahan sampai dengan triwulan I sebesar Rp1.542.600.000 (25% dari target 1 tahun).
- Penyusunan regulasi, Rapat Koordinasi dan Perjanjian Kerja Sama dengan OPD Mitra dan Bank Penyalur Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.
- Pemberian makanan tambahan formula untuk 435 balita gizi kurang pada Maret 2024.
- Mengalokasikan Subsidi Bunga Pinjaman kepada pelaku usaha mikro melalui Perumda BPR Bank Kulon Progo dengan realisasi triwulan 1 sebesar Rp 359.236.125 dengan 776 debitur.
- Perluasan kesempatan kerja melalui penyelenggaraan padat karya infrastruktur khususnya infrastruktur sederhana. Sasaran: Masyarakat Penganggur, Setengah Penganggur dan Masyarakat Miskin. Telah dilaksanakan rapat persiapan dan penyusunan juknis.
- Hibah sarana produksi dan peningkatan kapasitas bagi Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan.
- Pembangunan infrastruktur pedesaan.
- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Sembako APBD dan APBN.
- Penyaluran Bantuan Cadangan Beras Pemerintah.
- Pemberian Bantuan Pangan Telur Ayam.
- Subsidi Sektor Transportasi (Bansos untuk Operator Umum dan Ojek Pangkalan), Subsidi Angkutan Sekolah.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Koordinasi dalam rangka menjaga stabilitas harga dan pasokan perlu tetap dilaksanakan dalam rangka mengatasi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dan penting terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.

Bantuan Pangan Non-Tunai APBD melalui e-warong yang memberdayakan masyarakat dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa secara rutin efektif meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat.

Kebijakan pengendalian inflasi daerah dengan menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan telah terlaksana dengan baik melalui operasi pasar, pasar murah dan pemantauan harga sehingga harga di tingkat konsumen tetap wajar.

Program SPHP perlu terus dikoordinasikan dengan BULOG dalam rangka memenuhi kebutuhan beras dan jagung di masyarakat.

Kelancaran distribusi terlaksana dengan dukungan kegiatan berupa pembangunan jalan-jalan sebagai infrastruktur distribusi barang, forum komunikasi, kerjasama antar daerah GNPIP DIY, dan penyampaian hasil pemantauan harga melalui website sikepoku.go.id. Penyampaian laporan hasil pemantauan harga dilakukan secara rutin dan berkesinambungan.

Pemantauan harga terkhusus menjelang HBKN berkoordinasi dengan TPID DIY terus dilakukan.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Perlu dilakukan langkah antisipasi dalam menghadapi masa panen padi yang mundur karena dampak el-nino sehingga produksi padi mengalami penurunan.
2. Perlu dilakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam menangani kenaikan komoditas kebutuhan bahan pokok antara lain pelaksanaan pasar murah, pemberian bantuan pangan, dan lain - lain.
3. Perlu koordinasi dengan Perum BULOG untuk menjaga ketersediaan jagung tingkat peternak sebagai dukungan untuk para peternak layer baik melalui produksi lokal maupun SPHP Jagung.
4. Petani daerah dapat didorong untuk menanam jagung jika memang menguntungkan untuk petani. Ketersediaan jagung tingkat peternak untuk jangka panjang akan lebih efektif jika terbentuk ekonomi sirkular dari jagung sampai telur.
5. Mengoptimalkan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai langkah penguatan ekonomi melalui Usaha Mikro Kecil Menengah di Kulon Progo. Saat ini OPD yang mendampingi UMKM telah melakukan berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi UMKM dari segala sektor, baik Dinas Koperasi UKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan Perikanan, dan lain-lain.
6. Meningkatkan terus semangat "Bela Beli Kulon Progo" agar ekonomi daerah bertumbuh secara merata.
7. Perlunya meningkatkan koordinasi untuk pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar tetap memenuhi prinsip 7 (tujuh) tepat.
8. Penggunaan kartu tani dapat dioptimalkan, apabila ditemukan adanya permasalahan maka petani dapat dengan mudah untuk mengurusnya. Perlu mengupayakan penebusan pupuk secara manual, agar petani yang belum mendapatkan kartu tani dapat tetap menebus jatah pupuknya.
9. Perlunya untuk lebih mencermati RDKK dan memastikan agar semua petani yang masuk dalam anggota kelompok tani sudah terdaftar pada RDKK, dan juga terdaftar dalam SIMLUHTAN.